



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

EVALUASI RENCANA KERJA
TRIWULAN I (JANUARI-MARET)
TAHUN 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya jugalah sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan I (Pertama) Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat diselesaikan dengan baik.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Data yang digunakan dalam Evaluasi Rencana Kerja adalah data primer yang berasal dari isian formulir evaluasi hasil RENJA PD Tahun 2022.

Sinjai, 31 Maret 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
Nip. 19641214 198903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang.....	BAB I-1
BAB II	HASIL CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 TRIWULAN I (PERTAMA).....	BAB II-1
2.1	Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB II-1
2.2	Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja PD.....	BAB II-6
2.3	Kendala Yang Dihadapi.....	BAB II-22
BAB III	PENUTUP.....	BAB III-1
3.1	Kesimpulan.....	BAB III-1
3.2	Rekomendasi.....	BAB III-1
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

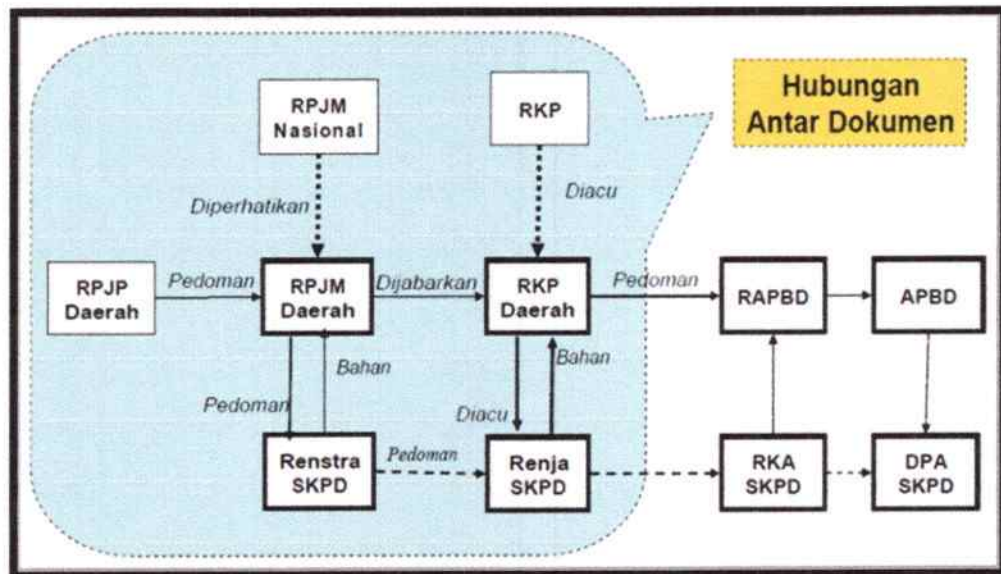
1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (RENJA) telah menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi RENJA PD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan RENJA PD tahun berikutnya.

Dalam kepemimpinan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan berbagai dokumen dalam mencapai tujuan sasaran PD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait
Pentingnya Evaluasi



Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk

menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah. Bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur Organisasi Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikut Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Dinas adalah :

1.1.1 Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas: antara lain :

1. melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
2. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.1.2 Fungsi

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1.1.3 Uraian Tugas

Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
- g. melaksanakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan kementrian, lembaga pemerintah non kementrian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. menetapkan hasil penilaian kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas *yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Kode			Urusan Wajib	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3			4	5	6	7
					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100 %	8.075.900.560,00
						Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100 %	
						Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %	
		1	03	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase dokumen penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	145.964.100,00
		1	03	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	5 Dokumen	102.464.100,00
		1	03	01	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	15.164.184,00
						Jumlah Laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	12 Laporan	28.335.816,00

		1	03	01	2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen waktu	100 %	6.301.215.493,00
		1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	79 Orang	6.101.215.493,00
		1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	50.000.000,00
		1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	150.000.000,00
		1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	167.189.600,00
		1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	12 Laporan	32.069.600,00
								Jumlah pengelola surat menyurat	7 Orang	135.120.000,00
		1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	384.887.600,00
		1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 Jenis	4.946.400,00
		1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang digunakan dalam setahun	12 Laporan	54.184.800,00
		1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Media/Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan dalam setahun	15 Jenis	23.330.000,00
		1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Laporan	302.426.400,00

		1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	415.399.967,00
		1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Pemakaian Listrik	134.533 VA	194.400.185,00
								Jumlah pemakaian jasa internet	10 Mbps	16.572.000,00
								Jumlah pemakaian telepon	40278 Menit	4.027.800,00
								Volume pemakaian air	6161.4 m3	31.607.982,00
		1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang disediakan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam setahun	145 Orang	18.792.000,00
								Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang disediakan dalam setahun	9 Orang	150.000.000,00
		1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang/Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan dalam kondisi baik	100 %	661.243.800,00
		1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	40 Unit	201.863.700,00
								Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	40 Unit	15.650.000,00
		1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah dan jenis kendaraan alat besar dalam kondisi baik dan siap pakai	24 Unit	350.530.100,00
								Jumlah kendaraan alat besar yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	24 Unit	56.730.000,00

		1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	28 Unit	20.000.000,00
		1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	27 Unit	16.470.000,00
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	73,56%	20.709.586.000,00
		1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah/Kabupaten	Jumlah sungai/danau/waduk/embung yang ditangani	2 Lokasi	55.000.000,00
		1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi	1 Dokumen	55.000.000,00
		1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Kabupaten	10756 Meter	20.654.586.000,00
		1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	1 Dokumen	100.000.000,00
		1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi yang dibangun	3726 Meter	12.160.000.000,00
		1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi Kabupaten yang Ditingkatkan/Direhab	6.621 Meter	7.890.544.000,00

		1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi dan Bangunan Air yang Terpelihara	33 D.I	504.042.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan SPM	100 %	6.910.242.000,00
		1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan, peningkatan, perluasan, dan pemeliharaan system penyediaan air minum	15 Unit	6.910.242.000,00
		1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan perluasan air minum	1 Dokumen	90.000.000,00
		1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	6 Unit	6.820.242.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR SISTEM LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	100 %	5.175.429.000,00
		1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	802 Unit	5.175.429.000,00
		1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	10 Unit	4483429000,00
								Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah 3R	1 Desa/Kelurahan	600.000.000,00

		1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana dan Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana dan Prasarana Limbah yang Tersedia	3 Unit	92.000.000,00
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	81,43%	150.000.000
		1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota dalam kondisi baik	2250 Meter	150.000.000
		1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Permukiman yang Terpelihara	200 Meter	100.000.000
		1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase permukiman yang dikerjakan	1250 Meter	1.250.000.000,00
		1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman Penduduk yang belum dapat dilalui Roda 4	6.39 %	400.000.000,00
		1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Permukiman yang terbangun pada Kawasan Strategis di Kabupaten/Kota	100 %	400.000.000,00
		1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan bagi permukiman yang dikerjakan	300 Meter	400.000.000,00
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Laik Fungsi	98,81 %	9.688.000.000,00

		1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan	1 Dokumen	100.000.000,00
		1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah pemeliharaan PJU	748 Buah	1.891.311.070,00
		1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	29 Km	61.976.486.426,00
		1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	38 Km	988.571.141,00
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator /teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	14,81 %	226.364.350,00
		1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	556 Orang	156.364.350,00
		1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	2 Kali	106.364.350,00
		1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Sertifikasi tenaga terampil konstruksi	50 Orang	50.000.000,00
		1	03	11	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan terselenggaranya sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan Kabupaten yang aktif dengan data yang termutakhir	100 %	70.000.000,00
		1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan informasi jasa konstruksi yang terup-date	1 Layanan	70.000.000,00

Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaan Terhadap RT/RW	100 %	204.746.660,00
		1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ditetapkan	0 Dokumen	154.746.660,00
		1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai	3 Lokasi	154.746.660,00
		1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap pemanfaatan ruang	100 %	50.000.000,00
		1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	12 Rekomendasi	50.000.000,00

Sumber: DPA TA 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai

BAB II
HASIL CAPAIAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 TRIWULAN I

2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Perbandingan RENJA dan RENSTRA Tahun 2022

Kode					Urusan Wajib	Jumlah Kegiatan		Ket
						RENJA	RENSTRA	
1					2	3	4	5
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	√	√	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat	√	√	
1	03	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	√	√	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daetah	√	√	
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	√	√	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	√	√	

1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturam Perundang-undangan	√	√	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang/Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	√	√	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	√	√	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah/Kabupaten	√	√	
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	√	√	
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	√	√	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	√	√	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	√	√	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	√	√	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	√	√	

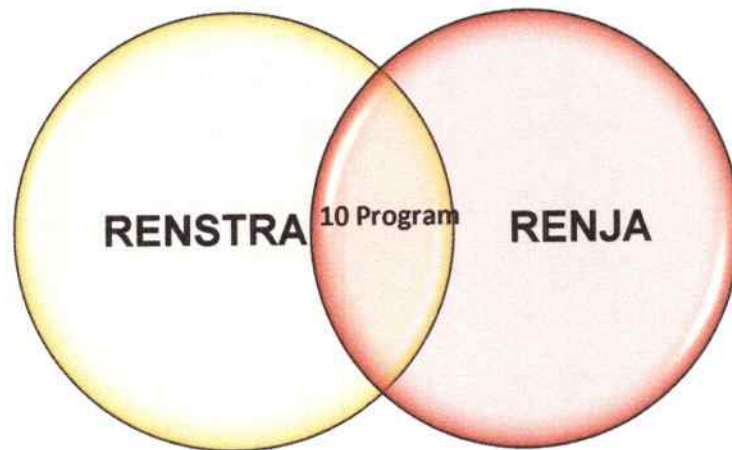
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	√	√	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	√	√	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	√	√	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	√	√	
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana dan Pengangkutan Lumpur Tinja	√	√	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	√	√	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	√	√	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	√	√	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	√	√	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	√	√	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	√	√	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	√	√	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	√	√	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	√	√	

1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	√	√	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	√	√	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	√	√	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	√	√	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	√	√	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	√	√	
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi	√	√	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	√	√	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	√	√	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	√	√	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	√	√	

Sumber :DPA Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai

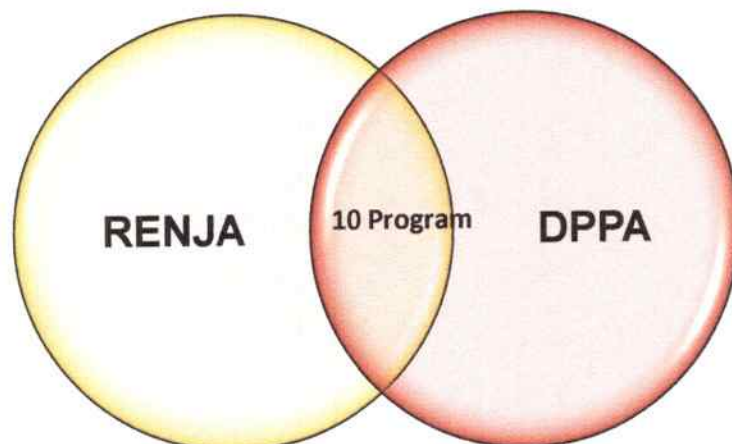
Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan RENSTRA dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dan RENSTRA sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program RENSTRA seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini :

Diagram 1 : Kesesuaian Jumlah Program RENJA Tahun 2022 dengan Jumlah Program PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2018 – 2023.
DPA



Jumlah Program dalam RENJA Tahun 2022 sebanyak 10 Program. Jumlah program dalam DPA Tahun 2022 sebanyak 10 Program. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan program DPA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dengan DPA sudah sesuai mencapai 100 %, artinya Tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program DPA Tahun 2022

Diagram 2 : Irisan Kesesuaian Jumlah Program DPA dengan Program RENJA Tahun 2022



2.2. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan RENJA PD, Sebagai Berikut :

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sesuai dengan tabel terlampir yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.464.100,- dengan indikator kinerja yaitu jumlah Perencanaan SKPD dengan target 5 dokumen. Pada triwulan Pertama target kinerja 1 dokumen, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 24,887,900.00 atau 24,29%, Realisasi kinerja sudah terealisasi sesuai target sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 13.479.920,- atau 13,16%.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.500.00,- dengan dua indikator kinerja yaitu Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 1 Laporan dan Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan SKPD dengan target 12 Laporan. Pada triwulan pertama target kinerja Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 1 Laporan dan jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD 3 laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 13,894,900.- atau 31,94%. Realisasi Kinerja terealisasi sesuai target sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 7.654.440,- atau 17,60%

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.101.215.493,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dengan target 79 orang. Pada triwulan pertama target kinerja Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 73 orang dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1,347,098,748,- .atau 22,08% Realisasi Kinerja sesuai dengan target yaitu jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sebanyak 73 Orang (23,86%), sedangkan penyerapan anggaran di bawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 1.035.233.906,- atau 16,97%. Realisasi kinerja dan anggaran sesuai dengan banyaknya pegawai sampai akhir triwulan I).

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dengan target 12 Laporan. Pada triwulan pertama target kinerja sebanyak 3 Laporan dengan rencana anggaran Rp. 14,140,000.00,- atau 28,28% Realisasi Kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 8.885.360,- atau 17,77%.

c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan

Pertanggungjawaban SKPD dengan target 12 Laporan. Pada triwulan pertama target kinerja sebanyak 3 Laporan dengan rencana anggaran Rp. 33,830,400,- atau 22,25%. Realisasi Kinerja sesuai target yang telah ditetapkan sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 23.877.000,- atau 15,92%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 167.189.600,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun dengan target 12 Laporan dan Jumlah pengelola surat menyurat sebanyak 7 Orang. Pada triwulan pertama target kinerja Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun sebanyak 3 Laporan dan Jumlah pengelola surat menyurat sebanyak 7 Orang (25%). dengan rencana anggaran Rp. 46,513,000,- atau 27,82%. Realisasi Kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 13.480.080,- atau 8,06%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.946.400,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dengan target 5 Jenis. Pada triwulan pertama target kinerja 5 Jenis (25%) dengan rencana anggaran Rp. 2,473,200,- atau 50%. Realisasi Kinerja sampai triwulan pertama belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya.

b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.184.800,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang digunakan dalam setahun dengan target 12 Laporan. Pada triwulan pertama target kinerja yang ditetapkan sebanyak 3 laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 13,546,200,- atau 25%. Realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 9.500.000,- atau 17,53%.

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.330.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Media/Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan dalam setahun dengan target 15 jenis. Pada triwulan pertama target kinerja yang ditetapkan yaitu Jumlah Media/Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan dalam setahun 15 Jenis (25%). dengan rencana anggaran Rp. 5,832,500,- atau 25% Realisasi Kinerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran sampai akhir bulan Maret belum ada yang terealisasi atau 0%.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 302.426.400,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan target 12 laporan. Pada triwulan pertama target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 75,606,600,- atau 25%. Realisasi

kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp 59.087.000,- atau 19,54%;

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 246.607.967,- dengan indikator kinerja yaitu Daya Pemakaian Listrik dengan target 134..533 VA, Jumlah pemakaian jasa internet target 10 Mbps , Jumlah pemakaian telepon target 40.278 Menit dan Volume pemakaian air target 61.61.4 m3. Pada triwulan pertama target kinerja dari empat indicator adalah Daya Pemakaian Listrik dengan target 33.633 VA, Jumlah pemakaian jasa internet target 10 Mbps (25%), Jumlah pemakaian telepon target. 10.069 Menit, dan Volume pemakaian air target 1.500 m3 dengan rencana anggaran Rp. 62,659,067,- atau 25,41%. Realisasi Kinerja untuk Daya Pemakaian Listrik 18.641 VA, pemakaian jasa internet 10 Mbps (25%), pemakaian telepon 1.037,1 menit, dan Volume pemakaian air 300 M3, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp.32.482.685,- atau 13,17%.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.792.000,- dengan dua indikator kinerja yaitu Jumlah Non ASN yang disediakan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam setahun dengan target 145 orang dan Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor

yang disediakan dalam setahun dengan target 9 orang. Realisasi kinerja dari dua indikator terealisasi sesuai target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana, yaitu sebesar Rp. 5.985.700,- atau 3,55%.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 217.513.700,- dengan dua indikator kinerja yaitu Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target 40 unit dan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Pengesahan Kelengkapan dengan target 40 unit. Realisasi kinerja pada triwulan pertama untuk pemeliharaan belum ada hanya ada 8 unit kendaraan dinas yang mendapatkan pengesahan kelengkapan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 930.840,- atau 0,43%.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 407.260.100,- dengan dua indikator kinerja yaitu Jumlah dan Jenis Kendaraan Alat Besar dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai dengan target 24 unit dan Jumlah Kendaraan Alat Besar yang mendapatkan Pengesahan Kelengkapan dengan target 24 Unit. Realisasi kinerja pada triwulan pertama untuk pemeliharaan kendaraan belum ada hanya ada 2 unit pada kendaraan dinas yang mendapatkan pengesahan

kelengkapan sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 3.359.820,- atau 0,82%.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000,000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan target 28 Unit. Pada Triwulan Pertama target yang ditetapkan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara yaitu sebesar 4 Unit dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- atau 25%. Realisasi kinerja sampai triwulan pertama melebihi kinerja yang telah ditetapkan yaitu 5 unit Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara, sedangkan realisasi anggaran belum ada atau 0%.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.470,000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan target 27 Unit. Pada triwulan pertama target yang ditetapkan yaitu sebanyak 6 unit Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4,117,500,- atau 25%. Realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran belum ada atau 0%.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) :

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

a. Penyusunan Pola dan Rencana SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi dengan target 1 Dokumen. Pada triwulan pertama belum ada target yang ditetapkan dengan rencana anggaran 13,420,000.- atau 24,40%. Realisasi kinerja sampai triwulan pertama belum ada begitupun dengan realisasi anggarannya.

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.

Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi dengan target 1 Dokumen. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 96,240,000.- atau 96,24%. Realisasi kinerja sampai triwulan pertama belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

b. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.160.000.000,- dengan indicator kinerja yaitu Panjang irigasi yang dibangun 3.726 Meter. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang

ditetapkan, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 3,661,000,000,- atau 30,11%. Realisasi kinerja sampai triwulan pertama belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.890.544.000,- dengan indikator kinerja yaitu Panjang Irigasi yang Ditingkatkan/Direhab dengan target 6.621 Meter. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2,410,613,200 atau 19,82%. Realisasi kinerja sampai triwulan pertama belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 504.042.000.- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Daerah Irigasi dan Bangunan Air yang Terpelihara dengan target 33 DI. Pada triwulan pertama belum ada target yang ditetapkan, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 109,135,200,- atau 21,65%. Realisasi kinerja sampai triwulan pertama belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;

a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.

Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000,000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen

Perencanaan Pengembangan dan perluasan air minum dengan target 1 Dokumen. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 3,000,000,- atau 3,33%. Realisasi kinerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.820.242.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan target 6 Unit (1221 SR). Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 48,000,000,- atau 0,70% .Realisasi kinerja pada triwulan pertama belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya. .

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.083.429.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dengan target 10 Unit (608 RT). Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1,560,000,000,- atau 30,69%. Realisasi kinerja pada triwulan pertama belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

b. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja.

Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah sarana dan Prasarana Air Limbah yang tersedia dengan target 3 Unit (25 RT). Pada triwulan pertama target kinerja yang ditetapkan yaitu 3 unit (8 RT), dengan rencana anggaran sebesar Rp. 28,449,600,- atau 30,92%. Realisasi Kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu dari 3 Unit kendaraan telah melayani 8 RT, sedangkan realisasi anggaran belum ada atau Rp.0,-..

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;

a. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Panjang Saluran Drainase Permukiman yang Terpelihara dengan target 200 Meter. Pada triwulan pertama belum ada target yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 97,240,000,- atau 97,24%. Realisasi kinerja sampai triwulan pertama belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

b. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Panjang saluran drainase permukiman yang dikerjakan 1.250 Meter. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 411,020,000,- atau 32,88%.

Realisasi kinerja pada triwulan pertama belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

6. Program Pengembangan Permukiman

1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;

a. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Panjang jalan lingkungan bagi permukiman yang dikerjakan 300 meter. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 28,894,000,- atau 7,22%. Realisasi kinerja pada triwulan pertama belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

7. Program Penataan Bangunan Gedung :

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

a. Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG.

Kegiatan Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah laporan Kegiatan Pengawasan dan Penerbitan

Bangunan di Kabupaten Sinjai dalam setahun dengan target 12 Laporan. Pada triwulan pertama target kinerja yang ditetapkan 3 laporan Kegiatan Pengawasan dan Penerbitan Bangunan di Kabupaten Sinjai dengan rencana anggaran sebesar Rp. 47,033,000,- atau 31,78%. Realisasi kinerja sampai triwulan pertama sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran belum ada atau 0%.

b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.500.000.000,- dengan tiga indikator kinerja yaitu Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab dengan target 7 Unit, Jumlah bangunan gedung yang dihibahkan target 3 unit , dan Jumlah sarana infrastruktur olahraga yang terbangun target 3 unit. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2,380,735,200,- atau 25,06%. Realisasi Kinerja sampai triwulan pertama baru pada tahap perencanaan, sedangkan realisasi anggaran belum ada atau 0%.

c. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Teknis HSBGN denga target 1 Dokumen. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar R.p. 19,032,600,- atau 47,58%. Realisasi kinerja pada triwulan pertama belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya.

8. Program Penyelenggaraan Jalan :

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;

a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan 1 Dokumen. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 96,467,600,- atau 96,47%.. Realisasi kinerja sampai triwulan pertama belim ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0%.

b. Pengelolaan Leger Jalan

Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.891.311.070,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah pemeliharaan PJU dengan target 748 Buah. Pada triwulan pertama target kinerja yang ditetapkan yaitu 187 Buah pemeliharaan PJU dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1,139,721,870,- atau 60,26%. Realisasi kinerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu 96 buah pemeliharaan PJU yang dilaksanakan, begitupun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 192.245.020 atau 10,16%.

c. Rekonstruksi Jalan

Kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.976.486.426,- yang mana sumber dana pada sub kegiatan ini terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dengan indikator kinerja yaitu Panjang Jalan yang Dikerjakan dengan target 29 Km. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan

rencana anggaran sebesar Rp. 13,135,656,926,- atau 21,19%. Realisasi kinerja dan anggaran sampai triwulan pertama belum ada.

d. Pemeliharaan Rutin Jalan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 988.571.141,- dengan indikator kinerja yaitu Panjang Jalan yang Dipelihara dengan target 38 km. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4,413,500,- atau 0,45%. Realisasi kinerja dan anggaran sampai triwulan pertama belum ada.

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi :

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;

a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.364.350,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil dengan target 2 Kali (100 orang). Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2,640,000,- atau 2,48%. Realisasi kinerja dan anggaran sampai triwulan pertama belum ada.

b. Fasilitasi Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi

Kegiatan Fasilitasi Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Sertifikasi tenaga terampil konstruksi sebanyak 50 Orang. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2,640,000 atau 5,26%. Realisasi kinerja dan anggaran sampai triwulan pertama belum ada.

2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah layanan informasi jasa konstruksi yang terup-date yaitu 1 layanan. Pada triwulan pertama belum ada target kinerja yang ditetapkan, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 17,456,250,- atau 24,94%. Realisasi kinerja dan anggaran pada triwulan pertama belum ada.

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang :

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;

a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.746.660,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai dengan target 3 Lokasi Taman Kota. Pada triwulan pertama target kinerja 3 lokasi (25%) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 39,300,400,- atau 25,40%. Realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar 7.135.440,- atau 4,61%..

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;

a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan indikator kinerja

yaitu Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan target 12 Rekomendasi. Pada triwulan pertama target kinerja yang ditetapkan yaitu 3 rekomendasi dengan rencana anggaran sebesar Rp. 14,760,000,- atau 29,52%. Realisasi kinerja pada triwulan pertama melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 6 rekomendasi, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 2.580.000,- atau 3,16%.

1.1 Kendala Yang Dihadapi

Rendahnya capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan I (Pertama) disebabkan masih adanya kegiatan yang sementara dalam tahap perencanaan sehingga belum bisa terukur sesuai target yang telah ditetapkan..

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini:

- ✚ Beberapa kegiatan pada triwulan I belum ada target pencapaian kinerja yang ditetapkan.
- ✚ Proses pelaksanaan, dimana waktu di awal pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal tidak sesuai (pelaksanaan kegiatannya terlambat).

BAB III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I (Pertama) masih jauh dari sempurna, ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang direncanakan belum bisa terlaksana secara maksimal.

Adapun total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu :

✚ Capaian Kinerja= 16,80 % (T)

✚ Capaian Anggaran =1,94% (SR)

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan I (Pertama) ini masih sangat rendah, tetapi ini bukan karena adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana tetapi karena Program dan Kegiatan tersebut ada yang memang dianggarkan untuk dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I (Pertama) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2022 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun ini.

1.2 Rekomendasi

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I (Pertama) ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai sampai Triwulan I (Pertama), sehingga untuk kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.

Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022 yaitu:

- ☀ Penyusun program dan kegiatan diharapkan mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang sudah ditetapkan;

- ✿ Perlu adanya komitmen SKPD dalam penyusunan evaluasi hasil Renja SKPD Tahun 2022 dan melaporkan kepada BAPPEDA setiap triwulan sesuai dengan format evaluasi renja SKPD;
- ✿ SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD;
- ✿ Meningkatkan kinerja SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang ada saat ini untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah.

Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022

Sinjai, 31 Maret 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat: Pembina Tk. I/IV.b
Nip. 19641214 198903 1 010

Kabupaten
SKPD
Periode RenKabupaten
SKPD
Periode Ren

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAMP I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92013

Sinjai, 28 Maret 2022

Nomor : 800106.112/DPUPR/III/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan I Tahun
Anggaran 2022

Kepada

YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas PUPR;
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR
Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan kinerja berdasarkan Rencana Aksi dan Rencana Kerja untuk capaian sampai Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Subbagian Program paling lambat tanggal 1 April 2022.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


IR. ANDI TAUFIQ SALEH. MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP.1964 1214 198903 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92613

Sinjai, 28 Maret 2022

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan I Tahun
Anggaran 2022

Kepada
YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas PUPR;
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR
Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka akan dilakukan rapat evaluasi kinerja lingkup Dinas.

Sehubungan hal tersebut disampaikan kepada Saudara(i) agar menghadiri rapat yang dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 6 April 2022
Waktu : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai

Demikian undangan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP.19641214 198903 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21499 SINJAI 92613

DAFTAR HADIR RAPAT

Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Sinjai
Tanggal/Bulan/Thn : 6 April 2022
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	A. TAUFIQ	KADIS	1.
2.	NAZARUDDIN T	SEK	2.
3.	SABRI	KABID CIPTAKARYA	3.
4.	Hj. Nurhasbiyah	Kabid. Jalon	4.
5.	NURFAH	PEMBINA JALON	5.
6.	HAERUDDIN	KASI OP SDH	6.
7.	HERMAN HATTA	JABFUN TB	7.
8.	ANDI MASSALINRI	Penata Ruang	8.
9.	Makmur, Watab	Penata Ruang	9.
10.	Sultan Arsyad	penata Ruang	10.
11.	ILHAM	KABID P. RUANG	11.
12.	BADRI HATTA	KORDE CDA	12.
13.	EDY HAFIL	KORUBANG UMPEG	13.
14.	AZHAR	KORI PLP	14.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21048 - 21498 SINJAI 92813

15.	NURHERMAWATI	KASUBAG PROGRAM	15.
16.	RUSTAN EFENDI	JEFUNG BM	16.
17.			17.
18.	RUSMAWATI	KASUBAG KCU	18.
19.	Weni Oetariana	Bendahara Pengeluaran	19.
20.			20.
21.	Ummi Saadah Darmawan	Staf	21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.	ABRUL HARIIS	Jefung tata Ruang	28.

Sinjai,

Notulis,

Nurhermawati, ST
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19750729 200604 2 022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Sinjai



Ir. Andi Taufiq Saleh, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

NOTULEN RAPAT

EVALUASI RENCANA AKSI/RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2022

Hari/Tanggal : Rabu, 6 April 2022

Pukul : 09.00 Wita s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Sinjai

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai

Pemimpin Rapat : Kepala Dinas

Moderator : Sekretaris Dinas

Notulis : Kasubbag. Program

Peserta Rapat :

1. Kabid. SDA
2. Kabid. Jasa Konstruksi
3. Kabid. Penataan Ruang
4. Kabid. Cipta Karya
5. Teknik Pengairan Ahli Muda (Haeruddin, SE.)
6. Penata Ruang Ahli Muda (Makmur Wahab, S.Sos.)
- 7.. Penata Ruang Ahli Muda (Sultan Arsyad, S.Sos.)
8. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Azhar, S.Sos.)

9. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Herman Hatta, ST.)
10. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Rustam Efendi, ST.)
11. Kasubbag. Keuangan
12. Penata Ruang Ahli Muda (Abdul Haris, ST.)
13. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Nurfah, S.Sos.)
14. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
15. Bendahara
16. Pelaksana Penata Ruang Ahli Pertama

Materi Rapat:

1. Masing- masing PPK/PPTK mengkroscek kembali laporan capaian kinerja yang telah disampaikan ke Sub. Bagian Program.
2. Para PPK/PPTK menjelaskan capaian kinerja sampai triwulan I, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Capaian Kinerja yang dilaporkan bukan banyaknya paket yang dikerjakan melainkan volume pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator pada masing-masing kegiatan.

Rapat diawali sambutan oleh Sekretaris Dinas selaku Moderator untuk melaksanakan rapat yang akan membiicarakan evaluasi program kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan mempersilahkan kepada Pemimpin Rapat dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan I Tahun Anggaran 2022.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pemimpin Rapat membuka acara mengatakan bahwa:

Para Pengelola kegiatan untuk hadir sehingga bisa menyampaikan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dan menjelaskan apa-apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Penyampaian kendala permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2022:

1. Dari Ibu Hj. Nurasibah, S.Sos., MM., selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi menjelaskan kegiatan yang ada di Bidang nya:

- Untuk Bidang Jasa Konstruksi mengelola 1 Program yang didukung 2 Kegiatan. Kegiatan 1 dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.364.350,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil dengan target 2 Kali (100 TK). Pada Triwulan pertama belum ada target pencapaian karena baru proses pembentukan panitia dan pelaksanaan koordinasi dengan balai, dan begitupun dengan sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi masih dalam tahap koordinasi dengan balai. Sedangkan Kegiatan 2 dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional layanan informasi jasa konstruksi ini masih tahap penyusunan SOP dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Bapak Muhammad Sabri AR, ST., MM., selaku Kepala Bidang Cipta Karya mengatakan:

- Untuk Pelaksanaan Kegiatan pada triwulan I, belum mencapai target hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan masih mencakup kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan utama, yaitu pada pelaksanaan perencanaan dan tahap/proses pendukung lainnya.

3. Dari Bapak Rustam Efendi, ST., selaku Sub Koordinator dan Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda menjelaskan:

- Untuk pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Jalan belum dilakukan lelang/tender, hal ini disebabkan karena adanya perubahan AHSP sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan volume output dan outcome yang sudah ditetapkan dalam RK TA. 2022..
- Kegiatan pemeliharaan jalan terkendala karena masih seringnya hujan sehingga pekerjaan belum bisa dimulai.
- Kegiatan pengelolaan leger jalan untuk kegiatan pemeliharaan sudah mulai berjalan, dan untuk pengadaan lampu rencana baru bisa dilaksanakan di triwulan II, hal ini disebabkan karena banyaknya kendala yang dihadapi, salah satunya karena adanya perubahan AHSP .

4. Dari Bapak Ridwan Jaya, ST., MM., selaku Sub Koordinator dan Teknik Pengairan Ahli Muda sekaligus penanggungjawab kegiatan, menjelaskan:

- Untuk Kegiatan pembangunan dan rehab jaringan irigasi kendalanya karena adanya penyesuaian kembali AHSP yang baru sesuai Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 dan penyesuaian kondisi cuaca dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

5. Bapak Ilham, ST, selaku Kepala Bidang Penataan Ruang menjelaskan kegiatan yang ada di Bidang Penataan Ruang:

- Bidang Penataan Ruang melaksanakan 1 Program dan 2 Kegiatan, dari kegiatan masing-masing terdiri 1 sub kegiatan.
1. sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, sudah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.
- 2. sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Rekomendasi Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang dengan target pada triwulan I yaitu 3 rekomendasi (informasi Teknis) dari 12 Rekomendasi (informasi Teknis) ditetapkan dalam 1 tahun anggaran, realisasi melebihi dari target yaitu sudah 6 Rekomendasi (informasi Teknis) yang dikeluarkan.

6. Bapak Edy Hafil, SE., selaku Kasubag. Umum dan Kepegawaian menjelaskan kegiatan yang ada di Sekretariat:

- Untuk kegiatan rutin, rata-rata semua kegiatan terealisasi sesuai target hanya pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional/lapangan maupun alat besar untuk belanja pemeliharaan kendaraan belum ada terealisasi, hal ini disebabkan karena belum adanya laporan dari masing-masing penanggungjawab kendaraan untuk dilakukan pemeliharaan kendaraan.

Sinjai, 6 April 2022

PEMIMPIN RAPAT,



NOTULIS,

NURHERMAWATI, ST.
NIP. 19750729 200604 2 022

BERITA ACARA


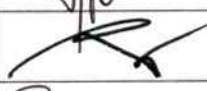
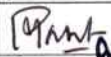

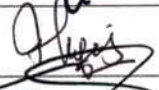


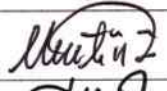
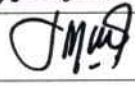
PELAKSANAAN RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI/RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Bulan April tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan I, Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan I ini dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan diikuti oleh Para Pejabat Eselon III, IV, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan pelaksana yang terkait dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Penyampaian Progres Fisik Pekerjaan masing-masing paket pekerjaan
2. Masalah Keterlambatan dan Rencana Percepatan dari masing-masing paket pekerjaan untuk setiap lingkup kegiatan

Demikian hasil Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan I untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Nazaruddin Taha, ST.	Sekretaris Dinas	
2.	M. Nur Badri Hatta, ST., M.Eng.	Kabid. SDA	
3.	Hj.Nurasibah, S.Sos., MM.	Kabid. Jakon	
4.	Ilham. ST.	Kabid. Penataan Ruang	
5.	Muhammad Sabri AR, ST., MM.	Kabid. Cipta Karya	
6.	Haeruddin, SE.	Teknik Pengairan Ahli Muda	
7.	Makmur Wahab, S.Sos.	Penata Ruang Ahli Muda	
8.	Sultan Arsyad, S.Sos.	Penata Ruang Ahli Muda	
9.	Azhar, S.Sos.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	

10.	Herman Hatta, ST.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
11.	Rustam Efendi, ST.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
12.	Rosmawati, S.Sos.	Kasubbag. Keuangan	
13.	Abdul Haris, ST.	Penata Ruang Ahli Muda	
14.	Nurfah, S.Sos.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	
15.	Edy Hafil, SE.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
16.	Weni Oktaviana, S.Sos	Bendahara	
17.	A. Massalinri, ST.	Pelaksana Penata Ruang Ahli Pertama	
18.	Nurhermawati, ST.	Kasubbag. Program	

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2022

